



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS KESEHATAN

Jalan : Bukit Hibul No.01 Telp.(0532) 2071010 Fax.(0532) 2071011
Nanga Bulik 74162

A. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET		REALISASI	
			2021	2022	2021	2022
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter	a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (capaian indikator kinerja : Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani 90,08%, Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani 85,68%, Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani 84,78%, Persentase pelayanan kesehatan balita yang dilayani 38,66%, Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilayani 58,20%, Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani 24,11%, Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 59,97%)	Angka Usia Harapan Hidup	70%	80%	63,07%	72,64%
	b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit (capaian indikator kinerja : Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 55,81%, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 64,20%, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 71,09%, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 52,89%, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 50,85%)		90%	95%	58,97%	33,78%
	c. Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan (capaian indikator kinerja : cakupan layanan BLUD Puskesmas 77,24%, persentase ketersediaan obat dan BHP sesuai dengan kebutuhan 94,94%, cakupan visitasi dan monitoring sarana berijin 95%, Cakupan puskesmas Re-akreditasi 13,7%)		80%	80%	75,85%	99,00%

B.Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD/APBN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022		REALISASI 2022		
			KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nama Program						
	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	100%	41.460.500.709,00	100%	39.290.831.570,00	94,77%
	b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80%	23.633.163.367,00	80%	19.572.064.592,00	82,82%
	c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	95%	827.101.750,00	95%	654.715.846,00	79,16%
	d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	98%	2.248.953.165,00	98%	2.078.745.559,00	92,43%
	e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	95%	6.333.464.504,00	95%	2.146.018.724,03	33,88%
1.1	Nama Kegiatan						
	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota						
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan daerah	1 tahun	36.679.636.573,00	1 tahun	34.981.094.707,00	95,37%
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 tahun	223.334.980,00	1 tahun	144.396.592,00	64,65%
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1 tahun	736.911.054,00	1 tahun	671.668.642,00	91,15%

	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1 tahun	3.549.820.273,00	1 tahun	3.226.998.079,00	90,91%
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1 tahun	270.797.865,00	1 tahun	266.673.550,00	98,48%
	6) Peningkatan Pelayanan BLUD	Laporan Keuangan BLUD	1 tahun	6.185.249.304,00	1 tahun	4.043.459.776,63	65,37%
	b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						
	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	830.977.000,00	1 dokumen	754.112.272,00	90,75%
	2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan SPM Bidang Kesehatan	12 laporan	22.802.186.367,00	12 laporan	18.817.952.320,00	82,53%
	3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan Sistem Informasi Kesehatan	1 laporan	576.591.081,00	1 laporan	451.994.291,00	78,39%
	c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan						
	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan	1 laporan	250.510.669,00	1 laporan	202.721.555,00	80,92%
	d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman						
	1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Laporan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	1 laporan	2.248.953.165,00	1 laporan	2.078.745.559,00	92,43%
	e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						
	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	148.215.200,00	1 laporan	75.650.100,00	51,04%
1.1.1	Nama Sub Kegiatan						

	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	443 orang/bulan	36.679.636.573,00	1 laporan	34.981.094.707,00	95,37%
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	153.334.980,00	1 paket	104.618.625,00	68,23%
	2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	70.000.000,00	10 orang	39.777.967,00	56,83%
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	17.598.910,00	1 paket	17.595.600,00	99,98%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	114.662.117,00	1 paket	109.547.476,00	95,54%
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	180.590.167,00	1 paket	156.715.433,00	86,78%
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	50.565.223,00	1 paket	36.759.288,00	72,70%
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 dokumen	17.400.000,00	7 dokumen	15.660.000,00	90,00%
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	365.094.637,00	80 laporan	335.390.845,00	94,19%

	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	6.150.000,00	1 laporan	6.150.000,00	100%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	205.167.250,00	1 laporan	182.208.606,00	88,81%
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	369.717.550,00	1 laporan	306.777.000,00	82,98%
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.968.785.437,00	1 laporan	2.731.862.473,00	92,02%
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	270.797.865,00	1 unit	266.673.550,00	98,48%
	f. Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bulik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2.128.799.295,00	1 unit kerja	1.561.914.006,60	73,37%
	2) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sematu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	944.572.216,00	1 unit kerja	598.651.259,00	63,38%
	3) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	251.344.506,00	1 unit kerja	138.700.440,00	55,18%
	4) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Merambang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	130.782.538,00	1 unit kerja	101.160.540,00	77,35%

	5) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Melata	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	496.037.989,00	1 unit kerja	341.931.235,00	68,93%
	6) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tapin Bini	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	505.751.902,00	1 unit kerja	160.140.371,00	31,66%
	7) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	491.705.183,00	1 unit kerja	318.538.045,96	64,78%
	8) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kinipan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	167.751.791,00	1 unit kerja	115.114.120,00	68,62%
	9) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Delang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	522.733.683,00	1 unit kerja	365.204.724,00	69,86%
	10) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	257.356.641,00	1 unit kerja	160.787.519,07	62,48%
	11) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Arga Mulya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	288.410.560,00	1 unit kerja	181.317.516,00	62,87%
	g. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
	1) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	830.977.000,00	1 unit	754.112.272,00	90,75%
	h. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1327 orang	369.919.000,00	1327 orang	203.521.592,00	55,02%
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6471 orang	301.552.859,00	6471 orang	219.577.550,00	72,82%
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	1609 orang	17.073.000,00	1609 orang	16.848.400,00	98,68%

		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 orang	18.538.000,00	2175 orang	14.295.000,00	77,11%
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	1.001.720.290,00	1 dokumen	925.483.179,00	92,39%
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	365.176.000,00	1 dokumen	294.420,00,00	80,62%
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	501.969.309,00	1 dokumen	482.407.483,00	96,10%
	8) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	208.274.025,00	1 dokumen	194.852.627,00	93,56%
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	128 orang	51,852.000,00	128 orang	42.360.600,00	81,70%
	10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	444.163.388,00	1 dokumen	411.669.354,00	92,68%
	11) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	8.661.558,880,00	1 dokumen	8.309.226.500,00	95,93%
	12) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	9.891.706.000,00	1 dokumen	7.248.085.428,00	73,27%
	13) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	968.683.616,00	1 dokumen	455.204.607,00	46,99%

	i. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan						
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen	576.591.081,00	1 dokumen	451.994.291,00	78,39%
	j. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	9 orang	250.510.669,00	9 orang	202.721.555,00	80,92%
	k. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	21 sarana	2.248.953.165,00	21 sarana	2.078.745.559,00	92,43%
	l. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	148.215.200,00	1 dokumen	75.650.100,00	51,04%

No.	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	a. Peningkatan pelayanan puskesmas terutama kepada masyarakat rentan	A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	94,77%		
				a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	95,37%		
			b. Penguatan pelayanan imunisasi, pelaksanaan kegiatan pencegahan yang terpadu dan penanganan penyakit sesuai standar	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	443 Orang/1 Tahun	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 95.37% atau Rp. 34.981.094.707 dari total pagu anggaran Rp. 36.679.636.573.	-	-
				b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	64,65%		
			c. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasana, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan serta peningkatan mutu layanan kepada masyarakat	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar 68,23% atau Rp. 104.618.625 dari total pagu anggaran Rp. 153.334.980.	-	-
				2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 56,83% atau Rp. 39.777.967 dari total pagu anggaran Rp. 70.000.000.	Kurangnya serapan anggaran sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan : 1. Cakupan pendidikan dan pelatihan formal pelaksanaan melalui sistem daring oleh Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah sehingga jumlah peserta menjadi terbatas dan pelatihan hanya diikuti oleh beberapa jenis profesi Kesehatan saja. 2. Hanya Bapelkes satu – satunya badan penyelenggara pelatihan tenaga Kesehatan yang terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pelatihan yang tersedia menjadi terbatas.	Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut: 1. Menunggu keadaan pandemic covid-19 lebih kondusif untuk memungkinkan pelaksanaan secara tatap muka 2. Dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara pelatihan selain Bapelkes Palangka Raya.
				c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	91,15		
				1) Penyediaan Komponen Instalasi	1 Paket	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-	-

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 99,98% atau Rp. 17.595.600 dari total pagu anggaran Rp. 17.598.910.		
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 95,54% atau Rp. 114.662.117 dari total pagu anggaran Rp. 109.547.476.	-	-
				3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 86,78% atau Rp. 180.590.167 dari total pagu anggaran Rp. 156.715.433.	-	-
				4) Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 72,79% atau Rp. 50.565.223 dari total pagu anggaran Rp. 36.759.288.	-	-
				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Dokumen	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 90% atau Rp. 17.400.000 dari total pagu anggaran Rp. 15.660.000	-	-
				6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 94.19% atau Rp. 356.094.637 dari total pagu anggaran Rp. 335.390.845.	-	-

				d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	90,91%		
				1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 100% atau Rp. 6.150.000 dari total pagu anggaran Rp. 6.150.000.	-	-
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 88,81% atau Rp. 182.208.606 dari total pagu anggaran Rp. 205.167.260	Kurangnya serapan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan tagihan untuk pembayaran PDAM berkurang dari tahun sebelumnya sehingga mengurangi tagihan PDAM.	Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan tetap mempertahankan pagu anggaran karena penggunaan sumber daya air dan listrik bersifat fluktuatif.
				3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 82,98% atau Rp. 306.777.000 dari total pagu anggaran Rp. 369.717.550.	Kurangnya serapan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dikarenakan ada perubahan di upah tenaga mekanik sesuai dengan SBU No. 188.45/89/11/HUK/2021 tentang HSPK yang berjumlah 155.000/hari.	Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan Menyusun Kembali pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan berpedoman pada SBU No. 188.45/89/11/HUK/2021 tentang HSPK yang berjumlah 155.000/hari.
				4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 92,02% atau Rp. 2.731.862.473 dari total pagu anggaran Rp. 2.968.785.437	Kurangnya serapan anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikarenakan rencana rekrutmen jumlah THL yang tidak sesuai dengan realisasi. Dana Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di rencanakan Rp. 3.878.266.860 untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum kantor namun pada realisasi tenaga yang masuk tidak mencapai target yang direncanakan.	Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan tetap menganggarkan pagu anggaran untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan melakukan rekrutmen Kembali untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan umum kantor.
				e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	98,48%		

				1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Realisasi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 98.48% atau Rp. 266.673.550 dari total pagu anggaran Rp. 270.797.865. Dengan rincian realisasi kegiatan: 1. Dekorasi ruang rapat 2. Pemeliharaan AC, aula dan gedung kantor Dinas Kesehatan 3. Pemeliharaan laptop dan printer	-	-
				f. Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Tahun	65,37%		
				1) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bulik	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bulik sebesar 73,37% atau Rp. 1.561.914.006,60 dari total pagu anggaran Rp. 2.128.799.295	1. Jasa pelayanan tidak terserap karena pendapatan menurun 2. Adanya rencana perubahan nilai/nominal biaya materai sehingga pembelian materai dikurangi (efisiensi belanja pengadaan) 3. Anggaran perjalanan dinas puskesmas banyak yang tidak terserap dan beberapa pertemuan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi covid 19. 4. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 5. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
				2) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sematu	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sematu sebesar 63,38% atau Rp. 598.651.259 dari total pagu anggaran Rp. 944.575.216	1. Belanja Bahan Obat masih tersisa dikarenakan kebutuhan obat sudah terpenuhi senilai realisasi dan ketersediaan obat dibantu dari Dinas Kesehatan. 2. Belanja Bahan Habis pakai medis masih tersisa dikarenakan kebutuhan BHP Medis sudah	1. Akan diperhatikan lagi dalam pengadaan peralatan untuk pustu dan polindes 2. Meningkatkan pelayanan puskesmas 3. Untuk semua kegiatan di dalam dan luar ruangan tetap menjaga protokol Kesehatan

							terpenuhi senilai relaisasi dan dibantu dari Pengadaan Dinas Kesehatan 3. Belanja Makan dan Minum masih tersisa dikarenakan Kegiatan ada kegiatan yang sudah di biayai dana BOK. 4. Anggaran Belanja Modal tidak banyak terserap dikarenakan ketersediaan Belanja modal masih ada dan sudah tercukupi sesuai realisasi. 5. Kebutuhan Perjalanan dinas dalam daerah meningkat dari tahun sebelumnya karena ada banyak kegiatan yang sebelumnya di BOK tidak ada sehingga dipindahkan ke BLUD 6. Pendapatan Puskesmas sematu menurun dikarekana dokter gigi tidak ada dan perubahan SK dari rawat inap menjadi rawat jalan	4. Melakukan Sinkronisasi dengan Pengelola Gudang Obat di Dinas Kesehatan untuk Penggadaan Obat / Ketersediaan Obat dan Bahan habis pakai medis/ Alat medis.
			3)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Jaya	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Jaya sebesar 55,18% atau Rp. 138.700.440 dari total pagu anggaran Rp. 251.344.506.	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokotoel kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
			4)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Merambang	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Merambang sebesar 77,35% atau Rp. 101.160.540 dari total pagu anggaran Rp. 130.782.538.	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokotoel kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
			5)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Melata	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Melata sebesar 68,93%	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas

						atau Rp. 341.931.235 dari total pagu anggaran Rp. 496.037.989	BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	sektor dengan tetap menerapkan prokoto kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.	
				6)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tapin Bini	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tapin Bini sebesar 31,66% atau Rp. 160.140.371 dari total pagu anggaran Rp. 505.751.902	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokoto kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
				7)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayat	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayat sebesar 64,78% atau Rp. 318.538.045,96 dari total pagu anggaran Rp. 491.705.183	Ada kelebihan pembayaran pada anggaran belanja BLUD puskesmas Bayat senilai Rp. 50.875.048	Kelebihan belanja blud bayat tersebut terdiri atas utang pembayaran jaspel puskesmas tahun 2021 yg kemudian akan dibayarakan pada januari 2022.
				8)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kinipan	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kinipan sebesar 68,62% atau Rp. 115.114.120 dari total pagu anggaran Rp. 167.751.791.	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokoto kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
				9)	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Delang	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Delang sebesar 69,86% atau Rp. 365.204.724 dari total pagu anggaran Rp. 522.733.683	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokoto kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.

				10) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kawa	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kawa sebesar 62,48% atau Rp. 160.787.519,07 dari total pagu anggaran Rp. 257.356.641	1. Adanya pandemi covid 19 dan penerapan protokol kesehatan dimana pengumpulan massa dibatasi sedangkan anggaran BLUD banyak yang dianggarkan untuk kegiatan UKM dengan melibatkan masyarakat 2. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan menurunnya kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas.	1. Akan dilakukan penjadwalan untuk semua kegiatan lebih awal dengan kerjasama baik lintas program dan lintas sektor dengan tetap menerapkan prokoto kesehatan. 2. Melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak takut berobat di fasyankes.
				11) Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Arga Mulya	1 Unit Kerja	Realisasi Program Peningkatan pelayanan BLUD sub kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Arga Mulya sebesar 62,87% atau Rp. 181.317.516 dari total pagu anggaran Rp. 288.410.560.	1. Realisasi pendapatan jasa layanan BLUD rendah dikarenakan penurunan jumlah kunjungan pasien pada masa pandemi covid 19. 2. Realisasi barang dan jasa juga rendah dikarenakan banyak peserta JKN yang tidak aktif dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang sudah tidka berlaku, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan kapitasi.	1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pandemi covid 19, sehingga menurunkan stigma buruk yagg ada dimasyarakat supaya masyarakat tidak takut berkunjung dipelayanan kesehatan. 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan kesehatan nasional. 3. Mengarahkan dokter puskesmas untuk memperpanjang SIP sebelum masa berlakunya habis.
				B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	70%	82,82%		
				a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90,75%		
				1) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar 90,75% atau Rp. 754.112.272 dari total pagu anggaran Rp. 754.112.272. Dengan rincian realisi indikator kinerja: 1. Rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu persatuan penduduk	Tidak tercapainya target realisasi indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikarenakan oleh beberapa faktor: 1. Masih kurangnya rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu persatuan penduduk dimana target rasio faskes 2.11 sedangkan berdasarkan perhitungan jumlah faskes berdasarkan jumlah penduduk per 1000 jiwa adalah 1.99. jumlah puskesmas 11, jumlah pustu 74, jumlah jumlah	Untuk meningkatkan realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Langkah yang dapat dilakukan : 1. Mempertimbangkan untuk menambah rasio faskes untuk memenuhi target

						<p>(target 2,11 dengan capaian 1,99) 94,47%.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (1 dokumen/100% dengan capaian 79%)</p> <p>3. Cakupan sarana roda empat yang dalam kondisi baik (target 70% dengan capaian 87.5%)</p> <p>4. Jumlah profil Kesehatan kabupaten lamandau yang disusun (target 1 dokumen/100% dengan capaian 100%)</p> <p>5. Jumlah laporan akhir tahun bidang Kesehatan (LPPD, LKPJ) (target 2 dokumen/100% dengan capaian 100%)</p> <p>Jumlah total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaian target indikator 92,19%.</p>	<p>poskesdes 51, dan jumlah polindes 28.</p> <p>jumlah penduduk kab. lamandau tahun 2021 (82.273 jiwa) download.html (bps.go.id)</p> <p>2. Pada laporan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya masih kurang dikarenakan adanya rencana pembangunan rumah dinas PKM Bulik yang gagal tender.</p> <p>3. Pada cakupan sarana roda 4 dalam kondisi baik. Berdasarkan laporan sarana prasarana, jumlah sarana roda 4 ada 8 buah dengan rincian 7 kondisi baik 1 rusak berat. Sehingga berdasarkan perhitungan jumlah sarana roda 4 dengan kondisi baik 87.5%.</p>	<p>berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk.</p> <p>2. Melakukan pengajuan Kembali pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP. Dengan memperhatikan penyebab gagal tender yang terjadi sebelumnya dan menyiapkan solusi sesuai permasalahan yang menjadi penyebab gagal tender.</p> <p>3. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada sarana roda 4.</p>
				b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	82,53%		
				1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1327 Orang	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 55,02% atau Rp. 203.521.592 dari total pagu anggaran Rp. 369.919.000 Dengan rincian realisasi indikator kinerja:</p> <p>1. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani (target 100 dengan capaian realisasi 90,08%)</p> <p>2. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani (target 100 dengan capaian realisasi 85,68%)</p>	<p>1. Untuk pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilayani adalah target 1390 bumil dan yang terlayani 1346 bumil (96,83%). Dengan pendukung pelayanan :</p> <p>a. Buku KIA (capaian 96,83)</p> <p>b. Tablet Tambah Darah (capaian 95,90)</p> <p>c. Vaksin Tetanus Difetri (Td) (capaian 54,39%)</p> <p>d. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu (capaian 96,83%)</p> <p>e. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin (capaian 72,66%)</p> <p>Jumlah total ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 90,08%.</p>	<p>Solusi dan tindak lanjut:</p> <p>1. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan penyamaan persepsi</p> <p>2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program</p> <p>3. Peningkatan Promosi kesehatan</p>

						<p>Jumlah total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaian target indikator 87,88%.</p>	<p>2. Untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dilayani adalah target 1327 ibu bersalin dan yang terlayani 1137 ibu bersalin (85,68%).</p> <p>Dengan pendukung pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) (capaian 85,68%) Buku KIA (capaian 85,68%) Formulir Fotograf (capaian 85,68%) <p>Jumlah total ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 85,68%.</p> <p>Kurang tercapainya target diakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> ANC (Antenatal Care) terpadu belum diterapkan. Persalinan standar di Faskes belum maksimal. Kasus ibu berisiko tinggi belum mendapat pengawasan yang baik. Sistem pencatatan pelaporan masih belum maksimal dan sering terlambat. Peran serta masyarakat yang belum maksimal. 	
				2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6471 Orang	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 72.82% atau Rp. 219.577.550 dari total pagu anggaran Rp. 301.552.859. Dengan rincian realisasi indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani (target 100% dengan capaian 84,78%) Persentase pelayanan Kesehatan balita yang dilayani (target 100% dengan capaian 38,66%). 	<ol style="list-style-type: none"> Capaian kinerja pada cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 100% atau melebihi dari target sasaran imunisasi dasar lengkap dari pusdatin, sehingga mempengaruhi nilai persentase indikator kinerja. Target dari pusdatin 1.221 balita sedangkan capaiannya 1.356 balita. Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani adalah target 1327 bayi dan yang terlayani 1125 (84,78%). <p>Dengan pendukung pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaksin Hepatitis BO (capaian 84,78%) Vitamin K1 Injeksi (capaian 84,78%) 	<ol style="list-style-type: none"> Cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan banyak warga pendatang dengan anak balita yang tidak tercatat. Sehingga mempengaruhi jumlah target sasaran imunisasi dasar lengkap dari pusdatin. hal ini dapat di tanggulasi dengan meningkatkan sasaran 5% - 10% dari target pusdatin.

					<p>3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (target 45% dengan capaian 111%)</p> <p>4. Cakupan desa / kelurahan UCI (target 45% dengan capaian 90.91%)</p> <p>5. Penemuan kasus Afp (target 1 orang dengan capaian 1 orang). pasien mendapatkan pelayanan kesehatan 100%</p> <p>Jumlah total target indikator kinerja 78% dan realisasi capaian target indikator 85,07%.</p>	<p>c. Salep/Tetes Mata Antibiotik (capaian 84,78%)</p> <p>d. Formulir Bayi Baru Lahir(capaian 84,78%)</p> <p>e. Formulir MTBM (capaian 84,78%)</p> <p>f. Buku KIA (capaian 84,78%)</p> <p>Jumlah total bayi baru lahir yang dilayani 85,68%.</p> <p>3. Untuk pelayanan Kesehatan balita yang dilayani adalah target 6471 balita dan yang terlayani 2967 (45,85%).</p> <p>Dengan pendukung pelayanan :</p> <p>a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku (capaian 45,85)</p> <p>b. Formulir DDTK (capaian 45,85)</p> <p>c. Buku KIA (capaian 45,85)</p> <p>d. Vitamin A Biru (capaian 45,85)</p> <p>e. Vitamin A Merah (capaian 45,85)</p> <p>f. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella (capaian 14,70)</p> <p>g. Jarum Suntik dan BHP (capaian 19,63)</p> <p>h. Peralatan Anafilaktik (capaian 0%)</p> <p>i. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell (capaian 19,63)</p> <p>Jumlah total Kesehatan balita yang dilayani 38,66%. Rendahnya capaian balita yang mendapatkan pelayanan dikarenakan masa pandemi covid 19.</p>	
			3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1609 Orang	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar</p>	<p>1. Untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis yang dilayani adalah target 1609 dan yang terlayani 846 (52,58%).</p> <p>Dengan pendukung pelayanan :</p> <p>a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) (capaian 55%)</p>	<p>1. Puskesmas dan jejaringnya melakukan penjangkaran TB di setiap desa.</p> <p>2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang TB baik tanda dan gejala/</p>

					<p>98,68% atau Rp. 16.848.400 dari total pagu anggaran Rp. 17.073.000</p> <p>Dengan rincian realisasi indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB yang dilayani (target 100 dengan capaian 106,55%) 2. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (target 100 dengan capaian 52,89%) <p>Jumlah total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaian target indikator 79,72%.</p>	<ol style="list-style-type: none"> b. Reagen Zn TB (capaian 52,58%) c. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 (capaian 52,58%) d. Catridge Tes Cepat Molekuler (capaian 7,09%) e. Formulir Pencatatan dan Pelaporan (capaian 52,58%) f. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (capaian 100%) g. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering (capaian 52,58%) <p>Jumlah total orang terduga tuberkulosis yang dilayani 52,89%.</p> <p>Rendahnya capaian ini dikarenakan tenaga kesehatan hanya menunggu masyarakat yang datang memeriksakan diri jika sudah memiliki tanda dan gejala TB. Kemudian masyarakat tidak berani memeriksakan diri ke fasyankes karena adanya pandemi covid 19. Pengetahuan masyarakat dalam pemeriksaan TB secara diri masih kurang.</p>	
			4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2175 Orang	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar 77,11% atau Rp. 14.295.000 dari total pagu anggaran Rp. 18.538.000. Dengan rincian realisasi indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani adalah target 2175 dan yang terlayani 1106 (50,85%). <p>Dengan pendukung pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner (capaian 50,85%) b. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama (capaian 50,85%) c. Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Puskesmas dan jejaringnya melakukan penjangkaran HIV. b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang HIV baik tanda dan gejala.

						<p>Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) (target 100 dengan capaian kinerja 50,85%)</p>	<p>sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK (capaian 50,85%) Masih rendahnya capaian pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV diakibatkan:</p> <p>a. ada beberapa puskesmas yang tidak melaksanakan kegiatan deteksi dini HIV pada kelompok resti. Beberapa puskesmas hanya mengandalkan kegiatan dari dinas kesehatan.</p> <p>b. Puskesmas hanya melakukan deteksi dini pada ibu hamil.</p>	
				<p>5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sebesar 92,39% atau Rp. 925.483.179 dari total pagu anggaran Rp. 1.001.720.290. Dengan capaian indikator kinerja :</p> <p>a. Cakupan KLB yang ditangani (PE) (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)</p> <p>b. Cakupan KLB yang ditangani (Covid 19) (target 100% yaitu 963 kasus dengan capaian pelayanan 100%)</p> <p>Jumlah total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaian target indikator 100%.</p> <p>Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat</p>	<p>1. Capaian vaksin pertama dan kedua yang masih belum mencapai target diakibatkan sebagian masyarakat yang ber KTP lamandau bekerja atau sekolah di luar kabupaten Lamandau, sehingga vaksinasi dilakukan di tempat mereka tinggal.</p>	<p>1. Vaksinasi masih terus dilakukan baik pada jam pelayanan di fasyankes, atau datang langsung ke desa- desa bahkan dengan melibatkan lintas sektoral.</p>

						<p>Bencana dan/atau Berpotensi Bencana juga terdapat kegiatan vaksinasi dengan target 100% (74.256 orang) baik vaksin dosis pertama dan kedua.</p> <p>Untuk capaian dosis pertama 81,76% (60.710 orang) dan capaian dosis kedua 49,49 (36.748 orang).</p>		
				6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar 80,62% atau Rp. 294.420.000 dari total pagu anggaran Rp. 365.176.000 Dengan rincian realisi indicator kinerja:</p> <p>a. angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (target 3 kematian ibu dengan laporan ada 4 kematian ibu)</p> <p>b. angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (target 20 kematian bayi dengan laporan ada 18 kematian bayi)</p> <p>c. Persentase Gizi buruk mendapat perawatan (target 84% dengan capaian 100% yang mendapatkan pelayanan gizi buruk)</p> <p>d. persentase pelayanan balita stunting (target 21,1 dengan balita stunting ada 12,82%)</p> <p>e. persentase pelayanan kesehatan ibu hamil KEK yang mendapatkan MT (target 80% dengan capaian pelayanan 86%)</p> <p>f. persentase ibu hamil anemia (target 30% dengan ibu yang hamil anemia hanya 0,45%)</p> <p>g. persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat AKI eksklusif (target 45% dengan capaian pelayanan 67,09%)</p> <p>h. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani</p>	<p>Target realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin masih rendah dari target yang di usulkan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan, diantaranya :</p> <p>1. Kualitas pelayanan belum sesuai standar.</p> <p>a. ANC terpadu belum diterapkan</p> <p>b. Persalinan standar di faskes belum optimal.</p> <p>c. Kasus ibu beresiko tinggi belum mendapat pengawasan dengan baik.</p> <p>d. System pencatatan pelaporan masih belum meksimal dan sering terlambat</p> <p>2. Peran serta masyarakat belum optimal.</p>	<p>Untuk meningkatkan pelayanan Pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Langkah yang perlu dilakukan dan ditingkatkan:</p> <p>1. Terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar dengan memberikan pelatihan dan pemantauan pelayanan ANC terpadu, optimalisasi standar persalinan faskes, melakukan pengawasan terhadap ibu bersesiko tinggi.</p> <p>2. Serta melibatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program.</p>

					<p>(target 50% dengan capaian pelayanan 81%)</p> <p>i. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilayani (target 50% dengan capaian pelayanan 58,25%)</p> <p>j. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (target 100% dengan capaian 59,97%)</p> <p>Jumlah total target indikator kinerja 57,51% dan realisasi capaian target indikator 58,20%.</p>		
			7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	<p>Pagu anggaran pada pelayanan kesehatan lingkungan Rp. 501.969.309 dengan realisasi anggaran Rp. 482.407.483 (96,10%), dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Fasyankes (RS dan PKM) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar (target 66% dengan capaian 100%) 2. Persentase desa atau kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) (target 50% dengan capaian 36,36%) 3. Persentase sarana air minum yang diawasi atau diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (target 64% dengan capaian 53,4%) 4. Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar (target 62% dengan capaian 82%) 5. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar (target 44% dengan capaian 60,4%) <p>Jumlah total target indikator kinerja 57,20% dan realisasi capaian target indikator 66,43%.</p>	<p>1. Rendahnya realiasi desa/kelurahan SBS yang baru mencapai 36.36% pada tahun 2021, hal ini dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai; b. Belum menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) terutama di bantaran sungai; dan c. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat <p>2. Catatan Tambahan (melampaui target)</p> <p>TFU yang diperiksa berdasarkan skala prioritas dari Kemenkes/Dinkes Prov yaitu Pasar; Sekolah dan Puskesmas Untuk PKM Bulik agar secara periodik melakukan IKL Pasar Induk karena merupakan Wilker PKM dan Sankit/KesLing Kit dipergunakan oleh Sanitaraian PKM setempat untuk meng IKL Pasar. Hal yang sama juga berlaku bagi PKM yang di Wilker nya memiliki pasar permanen</p> <p>3. Rendahnya capaian pengawasan kualitas air minum disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah SAM (Sarana Air Minum) yang ada di 	<p>1. Rendahnya realiasi desa/kelurahan SBS yang baru mencapai 36.36% pada tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Advokasi yang adekuat kepada pengampu kepentingan seperti Camat, Kepala desa dalam mengawal Dana ADD untuk percepatan Desa SBS dan Lintas sektor terkait lainnya; (sudah dilakukan) b. dunia usaha melalui dana CSR berdasarkan komitmen yang disepakati; (belum dilakukan dan akan dilakukan) c. Melakukan sinergi ke beberapa OPD terkait Sanitasi seperti DPUPR, DPMD, maupun BAPPEDA serta Koordinasi dan sinergi SBS dengan program terkait (sudah dilakukan) d. Pembuatan PERBUP Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Tahun 2022; (draft sudah disusun pada tahun 2021 dan akan

						<p>Kabupaten Lamandau yang tersebar hampir di 8 Kecamatan tidak berbanding lurus dengan frekuensi pengawasan kualitas air minum dan mengingat anggaran untuk pengawasan kualitas air minum juga tergolong kecil;</p> <p>b. Belum meratanya jumlah tenaga sanitarian dengan backgroun D3/D4 kesling di semua puskesmas. Di tingkat Puskesmas berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang PSDMK dan Kepegawaian bahwa dari 11 PKM untuk jumlah tenaga Sanitarian dengan background pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan berjumlah 6 (enam) orang ASN; Tenaga Kontrak tidak ada;. Dalam menggunakan Sanitarian KIT/KesLing Kit sebagai tools dalam pemeriksaan sampel air bersih pada program Survei Kesehatan Air Minum Rumah Tangga (SKAM RT) dari Kemenkes RI sesuai Juknis yang ada harus lah seorang Sanitarain (D3 Kesling) yang mampu mengoperasikan tools tersebut mengingat sudah terpenuhinya Sanitarian KIT pada 11 PKM dan 1 keslingkit di PKM Bulik.</p>	<p>diusulkan pada tahun 2022)</p> <p>e. Meningkatkan dan mendorong kepedulian masyarakat untuk perubahan perilaku SBS berkelanjutan melalui pemicuan yang dikoordinasikan oleh Puskesmas setempat (petugas kesling/pengelola program); (sudah dilakukan)</p> <p>f. Kembali melakukan pertemuan orientasi sekaligus penyegaran kembali STBM kepada SDM / Sanitarian/pengelola program Puskesmas di tahun 2023 untuk penganggaran APBD / BOKKB (dilakukan kembali pada tahun 2023)</p> <p>g. Jika diperlukan dan didukung oleh Linsek perlu kiranya dibentuk SATGAS SBS per-desa (belum dan akan dibentuk)</p> <p>2. Rendahnya capaian pengawasan kualitas air minum :</p> <p>a. Senantiasaa untuk membuka Formasi D3/DIV/S1 Kesling melalui usulan OPD Teknis ke BKPSDM tenaga CPNS/PNS (sudah dilakukan)</p> <p>b. Diperlukan promosi lowongan pekerjaan Tenaga Kontrak ke beberapa perguruan tinggi untuk menarik lulusan-lulusan D3/DIV/S1 Kesling ke Bumi Bahaum Bakuba (belum dilakukan)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<div>c. Menambah Anggaran pada alokasi kegiatan SAM yang diawasi atau diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar</div> <div>d. Senantiasa mengingatkan dan menyampaikan rekapitulasi di group untuk penyampaian pelaporan secara soft copy yang sudah disyahkan pimpinan puskesmas, fisik bisa menyusul (sudah dilakukan)</div> <div>e. Menyarankan kepada pimpinan puskesmas agar pengelola program yang beban kerja nya tinggi dan merangkap banyak pekerjaan agar dibantu oleh pegawai dengan beban kerja ringan</div> <div>f. Menerapkan punishment dan reward (belum dilakukan)</div>
				8) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebesar 93.56% atau Rp. 194.852.627 dari total pagu anggaran Rp. 208.274.025. Dengan rincian realisi indicator kinerja: 1. Desa siaga a. Sosialisasi dan pembentukan desa siaga (target 100% dengan capaian 100%) ada 5 desa siaga yang terbentuk yaitu bukit indah, samu jaya, benakitan, kinipan dan batu tambun. b. Pembinaan desa siaga aktif (target 100% dengan capaian 100%)	-	-

					<p>c. Pencetakan spanduk untuk kegiatan sosialisasi, bentuk dan pembinaan desa siaga (target 100% dengan capaian 100%).</p> <p>2. PIS PK</p> <p>a. Bimbingan teknis PIS PK (target 100% dengan capaian 100%) di 11 Puskesmas Kab. Lamandau.</p> <p>b. Konsultasi dan koordinasi program PIS PK dan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ke Dinkes Prov (target 100% dengan capaian 100%)</p> <p>3. Posyandu</p> <p>a. Pembinaan revitalisasi posyandu (target 100% dengan capaian 100%).</p> <p>Jumlah total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaian target indikator 100%.</p>		
			9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	128 Orang	<p>Pagu anggaran pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rp. 51.852.000 dengan realisasi anggaran Rp. 42.360.600 (81,70%), dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :</p> <p>1. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani (target 100 dengan capaian 71,09%)</p> <p>Target indikator kinerja 100% dan realisasi capaiannya adalah 71,09%.</p>	<p>Hasil pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan orang dengan masalah kesehatan jiwa adalah sebanyak 86 (67,17%) ODGJ yang dilayani sesuai standar kesehatan dari 128 ODGJ yang tercatat.</p> <p>Dengan pendukung pelayanan:</p> <p>a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis (capaian 100%)</p> <p>b. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi (0%)</p> <p>c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan ((capaian 100%)</p> <p>d. Media KIE(capaian 100%)</p> <p>Kurang tercapainya target pelayanan ini diakibatkan masih kurangnya kesadaran dan rasa malu dari pihak keluarga untuk membawa penderita ODGJ melakukan pemeriksaan kesehatan.</p>	<p>Dengan melakukan upaya pemberdayaan keluarga sebagai deteksi dan penyaring awal kesehatan jiwa. Diharapkan dengan pemberdayaan keluarga ini sebagai cara yang efektif untuk menutup gap terhadap stigma negatif bagi ODGJ dan keluarganya.</p>
			10) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	<p>Pagu anggaran pada Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp. 444.163.388</p>	<p>1. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani belum mencapai target karena</p>	<p>1. Untuk meningkatkan persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut</p>

					<p>dengan realisasi anggaran Rp. 411.669.354 (92,68%), dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang dilayani (target 100% dengan capaian 55,81%)2.Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilayani (target 100% dengan capaian 58,20%)3.Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilayani (target 100% dengan capaian 24,11%)4.Persentase pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang dilayani (target 100% dengan capaian 64,20)5.Cakupan skrining kesehatan haji (target 100% dengan capaian 100%)6.Persentase implementasi sekolah dengan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) (target 35% dengan capaian 14,28%)7.Cakupan penderita DBD yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)8. Annual Paracite Incidence (Permil) (target 0 dengan realisasi 0 capaian pelayanan 100%)9.cakupan penderita chikungunya yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)10. Balita dengan pneumonia yang di tangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)11. Penderita ISPA yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)12. Penderita diare yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)13. Penderita typoid yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)	<p>lansia yang datang ataupun lansia yang memanfaatkan fasyankes pada wilayah kerja pada dasarnya lansia yang melakukan kunjungan berulang.</p> <p>2. Persentase implementasi sekolah dengan KTR belum tercapai karena terdapat warga sekolah/guru/pengunjung yang melakukan aktivitas merokok di dalam lingkungan sekolah meskipun sudah terdapat tanda/peringatan dilarang merokok. Kondisi sekolah yang tidak memiliki pagar sehingga memudahkan akses keluar masuk lingkungan sekolah diluar jam sekolah maupun pada saat jam sekolah. Serta kurangnya kesadaran bahwa sekolah termasuk dalam 7 kriteria KTR.</p>	<p>yaitu dengan melakukan skrining/deteksi dini/pemeriksaan kesehatan pada kegiatan luar gedung dan dalam gedung.</p> <p>2. Dilakukan sosialisasi secara terus menerus dari pihak sekolah tentang sekolah kawasan tanpa rokok (KTR).</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>14. Persentase pelayanan kesehatan tripe eliminasi (target 100% dengan capaian pelayanan 72,33%)</p> <p>15. Cakupan penderita kusta yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 66,67%)</p> <p>16. Cakupan minum obat kecacingan (target 75% dengan capaian pelayanan 93%)</p> <p>17. Cakupan penderita rabies yang ditangani (target 100% dengan capaian pelayanan 100%)</p> <p>Total target indikator kinerja 94,71% dan realisasi capaiannya adalah 79,33%.</p>		
			11) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar 95.93% atau Rp. 8.309.226.500 dari total pagu anggaran Rp. 8.661.558.880</p> <p>Dengan target kinerja 90,21%, berdasarkan data dari BPJS jumlah penduduk kabupaten Lamandau 100.240 jiwa dan yang menerima pelayanan 90.431 jiwa.</p>		
			12) Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar 73,27 atau Rp 7.248.085.428 dari total pagu anggaran Rp. 9.891.706.000</p>	<p>1. Banyak program yang tidak dapat dilaksanakan karena menunggu keluarnya Juknis dan perubahan RKA pelayanan puskesmas di masa pandemi yang terbaru.</p> <p>2. Pandemi covid-19 juga menghambat terlaksananya kegiatan dan pelayanan Puskesmas karena Kasus yang masih terus meningkat.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian program kerja untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja dan anggaran.</p> <p>2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan</p>
			13) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	<p>Realisasi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan</p>	Tidak tercapainya target realisasi indikator kinerja sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada 11	Untuk meningkatkan pelayanan Pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

						untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar 46,99% atau Rp. 455.204.607 dari total pagu anggaran Rp. 968.683.616. Dengan rincian realisi indicator kinerja: 1. Cakupan laporan pelaksanaan publik safety center (target 100% dengan capaian 100%) 2. Cakupan pembinaan dan penilaian puskesmas berprestasi (target 100% dengan capaian 96%) ada 11 puskesmas yang mendapat pembinaan dan penilaian puskesmas berprestasi. 3. Cakupan puskesmas re-akreditasi (target 100% dengan capaian 13,7%) Total target indikator kinerja 100% dan realisasi capaiannya adalah 69,90%.	puskesmas re-akreditasi dan laboratorium dikarenakan pandemi covid 19 berdasarkan surat edaran dari kementrian Kesehatan.	masyarakat kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Langkah yang perlu dilakukan: 1. Tetap merencanakan kegiatan re-akreditasi di tahun berikutnya 2. Kegiatan yang tertunda di tahun sebelumnya akan dilaksanakan ditahun yang akan datang sehingga meminimalisir untuk penyerapan dana yang sudah disediakan.
				c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	1 Laporan	78,39%		
				1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Realisasi Program Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebesar 78,39% atau Rp.451.994.291 dari total pagu anggaran Rp.576.591.081		
				C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	85%	80,92%		
				a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100%		
				1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar 97,89% atau Rp. 215.357.146 dari total pagu anggaran Rp.	-	-

						220.000.000. realisasi indikator kinerja : target 100% dengan capaian 100% yaitu pemberian insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan covid 19.		
				b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80,92%		
				1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9 Orang	Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 80.92% atau Rp. 202.721.555 dari total pagu anggaran Rp. 250.510.669. Dengan realisasi indicator kinerja: 1. Terpilihnya tenaga Kesehatan teladan (target 50% dengan capaian 25%) 2. Pengelolaan tenaga Kesehatan melalui THL program 1 desa 2 tenaga Kesehatan (target 75% dengan capaian 88%). Total target indikator kinerja 62,5% dan realisasi capaiannya adalah 56,5%.	1. Kurangnya minat dan inovasi tenaga Kesehatan sebagai calon tenaga Kesehatan teladan dan peserta yang diusulkan hanya 1 orang yaitu dari 1 Puskesmas saja serta tidak ada pelaksanaan ditingkat Provinsi Kalimantan karena pandemi covid-19. 2. Tidak ada kesempatan dari setiap calon tenaga Kesehatan teladan yang akan diusulkan oleh Puskesmas sehingga dari 9 jenis tenaga Kesehatan yang diperlombakan hanya dapat diikuti oleh 4 jenis tenaga Kesehatan saja.	1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan penguatan pada pendampingan dan pembinaan kepada setiap calon tenaga Kesehatan teladan baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Provinsi.
				D. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	94%	92,23%		
				a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Laporan	92,43%		
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	21 Sarana	Realisasi Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kegiatan Pemberian Izin	1. Kendala pengadaan obat dimana proses pemesanan obat dengan E-Katalog terlambat	Dukungan dalam perbaikan sistem dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan.

				Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		<p>Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebesar 92,43% atau Rp. 2.078.745.559 dari total pagu anggaran Rp. 2.248.953.165 Dengan capaian indikator kinerja:</p> <p>a. persentase ketersediaan obat dan BHP sesuai dengan kebutuhan (target 90% dengan capaian 94,94%)</p> <p>b. cakupan visitasi dan monitoring sarana berijin (target 80% dengan capaian 95%)</p> <p>c. cakupan pengawasan obat dan makanan (target 80% dengan capaian 84,65%)</p> <p>d. persentase alat kesehatan terkalibrasi di 11 puskesmas (target 80% dengan capaian 77,88%)</p> <p>Total target indikator kinerja 82,50% dan realisasi capaiannya adalah 88,12%.</p>	<p>karena obat baru mulai tayang di LPSE diakhir TW 2, sehingga berpengaruh kewaktu produksi dan datangnya obat, ED obat pendek (sekitar 2 tahun untuk tablet dan sirup dan sekitar 1 tahun untuk injeksi. Akhirnya ada beberapa penyedia yang awalnya bersedia memenuhi kebutuhan obat, ternyata karena banyaknya permintaan E-Katalog dari seluruh Indonesia, berakibat tidak sanggup memenuhi kuota pesanan obat. Apalagi pesanan obat terkait masa kontrak pengadaan yang sudah ditetapkan.</p> <p>2. Serapan anggaran pada kegiatan pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) tidak dapat maksimal karena banyak IRTTP yang berada di dalam kota (nanga bulik) dilakukan pengawasan/visitasi namun tidak dapat di SPJ kan terkait aturan perjalanan dinas dalam daerah.</p> <p>3. Pada kegiatan kalibrasi alat kesehatan ditemukan banyaknya alat kesehatan yang aksesorisnya hilang sehingga tidak dapat dikalibrasi, listrik di puskesmas terbatas menyebabkan kalibrasi tidak dapat berfungsi untu mengkalibrasi tiap alat kesehatan.</p>	
				E. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	80%	65,05%		
				a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	51,04%		
				1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	1 dokumen	Realisasi Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	-

				Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 51,04% atau Rp. 75.650.100 dari total pagu anggaran Rp.148.215.200. Sub kegiatan ini mendukung dalam kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Palang Merah Indonesia (PMI).		
--	--	--	--	---	---	--	--